

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sebagai investasi yang akan menghasilkan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangsa. Dari sekian sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah uang. Uang dipandang ibarat darah dalam tubuh manusia yang mati hidupnya ditentukan oleh sirkulasi darah dalam tubuh. Uang termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu uang perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan.

Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Manajemen dalam lembaga pendidikan berbeda dengan manajemen keuangan perusahaan yang berorientasi adanya laba. Pendidikan akan berjalan sesuai dengan tujuan apabila dijalankan sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam pemerataan pendidikan agar mendapatkan hasil yang maksimal memerlukan proses pendidikan salah satunya yaitu melalui pembelajaran, dengan pembelajaran, kita dapat memberikan berbagai macam aspek pendidikan kepada anak didik dengan menyelenggarakan proses pembelajaran secara sistematis dan terkontrol sehingga kita dapat mengetahui secara pasti tingkat perubahan pendidikan dan dapat melakukan evaluasi terhadap setiap perubahan potensi peserta didik, dan selama itu pula kita dapat melakukan proses penilaian atas perubahan tersebut. Merujuk kepada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi pembelajaran terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan pada semua mata pelajaran, baik mata pelajaran umum maupun agama.

Biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik terutama dalam hal peningkatan mutu proses pembelajaran, biaya pendidikan harus dikelola dengan

optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah mencapai mutu sekolah yang diharapkan. Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya adalah pencapaian visi dan misi sekolah. Tahapan manajemen pembiayaan pendidikan melalui tahapan perencanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan.

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai perwujudan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan program dana Bantuan Operasional Sekolah.¹ Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013 menerangkan bahwa, Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan, dengan sasaran semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia, dana BOS dikeluarkan dalam empat triwulan untuk satu tahun (satu periode), berdasarkan prosedur yang ada dana BOS perlu di kelola secara relevan dan efektif. “yaitu tujuan yang direncanakan semula benar-benar tercapai”.² Organisasi dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekolah pada dasarnya juga merupakan sebuah organisasi dengan demikian sekolah dapat dikatakan baik apabila mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dari itu supaya dana BOS sesuai dengan tujuan yang telah di tentukan perlunya memahami pengelolaan bagaimana mengelola

¹ Depdiknas, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, 2009).

² Pidarta, Made, *Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan* (Sarana Press, 2000), 257.

keuangan khususnya dana BOS.³ Indikator pengelolaan yang baik yaitu perencanaan, pemanfaatan, serta pelaporan dan pertanggung-jawaban penggunaan dana BOS.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, pemerintah mengalokasikan dana BOS senilai Rp 53,91 triliun pada tahun depan. Nilai tersebut meningkat tipis 0,8% dari outlook APBN 2021. Sasaran dana BOS tersebut meliputi 45,1 juta siswa untuk BOS reguler. Sementara, 8.736 sekolah akan mendapatkan dana BOS Kinerja. Dan untuk dana BOS tahun 2022 memiliki regulasi baru yang lebih fleksibel dan efisien. Kedua asas itu menjadi landasan untuk membelanjakan dana BOS 2022 sesuai dengan juknis BOS 2022.

Mengenai penggunaan dana BOS 2022 ditengah Pandemi Covid-19, sebagian dana bisa di realokasi maka dialihkan ke pendanaan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 misalnya membuat tempat cuci tangan, spanduk pencegahan penyebaran Covid-19 maupun penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
Sekolah SMA Muhammadiyah Per Komponen Tahun 2021

No	SMA MUHAMMADIYAH SE-KABUPATEN BANDUNG			
	Triwulan			
	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1	SMA MUHAMMADIYAH 2 MAJALAYA			
	77.560.000	155.120.000	77.560.000	99.960.000
2	SMA MUHAMMADIYAH 3 CIPARAY			
	26.320.000	0	0	26.880.000
3	SMA MUHAMMADIYAH 4 MARGAHAYU			
	73.360.000	146.720.000	73.360.000	70.560.000
4	SMA MUHAMMADIYAH 5 RANCAEKEK			
	52.920.000	105.840.000	52.920.000	55.720.000
5	SMA MUHAMMADIYAH 6 KERTASARI			
	113.120.000	226.240.000	113.120.000	121.520.000

Sumber: bos.kemdikbud.go.id, 2021

Dari tabel 1.1 Data rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS Periode 2020 - 2021 di atas bisa di simpulkan bahwa program pembiayaan pendidikan yang di salurkan oleh pemerintah melalui dana BOS cukup besar sehingga tujuan dari

³ Bafadal, Ibrahim, *Manajemen Peningkata Mutu Sekolah Dasar Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2012), 99.

program BOS yaitu dari sisi peningkatan kualitas mutu pendidikan bisa di realisasikan terutama dalam peningkatan kualitas mutu pembelajaran yang berkualitas.

Dalam ketentuan komponen dana BOS jelas bahwa realisasi penggunaan dana BOS harus di alokasikan ke dalam Pengembangan 8 Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tetapi dalam kenyataannya pengalokasian dana BOS tidak merata ke setiap Standar bahkan banyak pemberitaan yang menjelaskan hampir 50% lebih di peruntukan untuk honor padahal batas maksimum penggunaan BOS untuk membayar honor sebesar 15% dari total BOS yang diterima, tapi untuk tahun 2020 sampai 2022 sekarang besaran yang di peruntukan untuk honor di tambah menjadi 50% dari total Bantuan Operasional Sekolah.

Berkaitan dengan masalah peningkatan kualitas hasil belajar siswa tersebut, sarana dan prasarana sekolah juga merupakan salah satu faktor instrumental yang sangat penting dalam menunjang pembelajaran. Sarana prasarana sekolah yang tidak memadai akan menghambat kegiatan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan standar sarana dan prasarana untuk SMA di Indonesia dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008, agar SMA di Indonesia dapat menciptakan susasana belajar yang nyaman, aman, dan kondusif, sehingga siswa dapat menerima dan memahami materi yang diberikan oleh guru dengan mudah.

Tabel 1.2
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).
Akreditasi SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung

No	8 Standar Nasional Pendidikan	SMA Muhammadiyah 2 Majalaya	SMA Muhammadiyah 3 Ciparay	SMA Muhammadiyah 4 Margahayu	SMA Muhammadiyah 5 Rancaekek	SMA Muhammadiyah 6 Kertasari
1	Standar Isi	100.00	90	94	83.00	90.00
2	Standar Proses	100.00	85	86	91.00	88.00
3	Standar Kelulusan	100.00	72	89	94.00	97.00
4	Standar Tenaga Pendidik	85.00	82.5	76	86.00	65'00

5	Standar Sarana Prasarana	67.00	7.416.666.6 67	72	74.00	68'00
6	Standar Pengelolaan	98.00	87.5	94	94.00	94.00
7	Standar Pembiayaan	93.00	91	93	98.00	97.00
8	Standar Penilaian	100.00	93.75	86	99.00	71.00
Tahun		2018	2013	2015	2016	2017
Nilai Akhir		92.00	84.475	86	90.00	83.00
Akreditasi		A	B	A	A	B

Sumber: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M), 2021

Dari data di atas yang diambil dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Akreditasi SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung di atas bisa di simpulkan bahwa dari 8 Standar Nasional Pendidikan yang dijadikan penilaian terhadap Nilai Akreditasi jelas sekali bahwa Standar yang mendapat nilai kecil adalah dari Standar Sarana Prasarana maka dari itu perlunya peningkatan Sarana Prasarana untuk menunjang Proses Pembelajaran.

Namun pada kenyataannya, meskipun telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, masih banyak SMA di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat, yang kondisi operasional sekolahnya rendah dan sarana prasarana sekolah masih terbatas. Bahkan sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu tolak ukur dari mutu sekolah. Tetapi fakta dilapangan banyak ditemukan sarana dan prasarana yang tidak dikelola dengan baik, untuk itu diperlukan pemahaman dan pengaplikasian manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan berbasis sekolah.

Agar semua sarana dan prasarana pendidikan memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya sarana dan prasarana pendidikan harus dikelola dengan baik. Dengan pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik diharapkan suatu lembaga pendidikan mampu mewujudkan kegiatan pembelajaran yang bermutu pula. Pengelolaan sarana dan prasarana seperti ini harus dimiliki dan diterapkan pada semua lembaga pendidikan pada semua jenjang.

Kemudian berhubungan dengan mutu suatu pendidikan sangat berkaitan dengan mutu suatu pembelajaran tertentu, baik berkenaan dengan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi satuan pendidikan tertentu. Berkaitan dengan mutu pembelajaran (Rohmat, 2015) mengatakan, adanya fungsi-fungsi teknologi pendidikan tertentu baik meliputi pengelolaan maupun fungsi pengembangan dipresiasi dalam sumber belajar. Sumber belajar meliputi orang, pesan, bahan, teknik, alat, dan latar. Sumber belajar itulah yang secara operasional berkaitan secara langsung kepada peserta didik.⁴

Strategi Pembelajaran juga dapat diungkapkan dengan kata lain seperti metode, siasat, cara, sistem, dan teknik. Strategi pembelajaran tidak dapat dilepaskan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh pembelajar dalam proses belajar mengajar. Pembelajar perlu mengembangkan proses belajar mengajarnya dengan berbagai strategi pembelajaran. Tidak ada strategi pembelajaran yang terbaik kecuali strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar, sifat materi, media pembelajaran, latar dan orientasi tujuannya.⁵ Dalam hal demikian sarana dan prasarana pembelajaran juga sangat memegang peranan penting dalam andil mewujudkan suatu mutu hasil pembelajaran. Sarana dan Prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan secara optimal. Seiring dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2014/2015 maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai secara optimal, untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan, sekolah dituntut untuk memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kebutuhan sekolah menurut kebutuhan berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang undangan pendidikan nasional yang berlaku.

⁴ Rohmat, *Teknologi Pembelajaran Perspektif Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 35.

⁵ Rohmat, *Teknologi Pembelajaran Perspektif Pendidikan Islam.*, 47.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab VII Pasal 42, juga dengan tegas disebutkan bahwa; (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Mulyasa dalam MBS menyebutkan bahwa sarana pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman, jalan menuju tempat belajar, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman digunakan untuk pengajaran biologi, halaman sebagai lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.⁶ Upaya peningkatan kualitas pendidikan telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Berbagai program dan kebijakan digulirkan baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun sekolah. Begitu pula dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Selain pemenuhan tersebut juga harus dibarengi dengan pengelolaan yang baik dan sesuai dengan standar nasional dan landasan pembelajaran yang berlaku, agar dapat sepenuhnya mendukung pembelajaran. Kualitas sekolah yang rendah, sebenarnya merupakan area strategis untuk dikembangkan, terutama dalam penguatan kebijakannya. yaitu berkaitan dengan faktor-faktor penyebabnya, seperti minimnya kualitas sarana/prasarana sekolah, manajemen sekolah, kualitas tenaga pendidik, dan lainnya.⁷

Sarana Prasarana pendidikan sebagai salah satu penunjang keberhasilan pendidikan, yang mengacu pada Standar sarana dan prasarana yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri, seringkali menjadi kendala dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.⁸ Kendala-kendala yang

⁶ Mulyasa, E, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet Ke-2, 2004), 49.

⁷ Daryanto, H.M, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Rineke Cipta, Cet, 2, 2005), 32.

⁸ Djamarah, Syaiful Bahri, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rineksa Cipta, 2000), 29.

dihadapi antara lain adalah adanya penyediaan sarana yang belum memadai atau belum lengkap. Permasalahan sarana dan prasarana sangat penting untuk ditangani lebih serius, karena sangat berpengaruh dalam kelancaran proses belajar mengajar, karena disamping menjadi lebih nyaman, juga sekaligus menjadi media pembelajaran dengan peralatan yang harus disesuaikan termasuk penyediaan fasilitas yang mutlak harus dipenuhi, yang tentunya kesemuanya itu harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu dan pengetahuan.

Seringkali dalam pemenuhan sarana dan prasana ditentukan oleh pihak sekolah bersama komite sekolah berdasar pada keinginan dan kebutuhan sekolah masing-masing semata.⁹ Bagi beberapa sekolah yang telah memenuhi segi sarana dan prasarana akan meningkatkan mutu pendidikan agar lebih baik lagi, hal ini adalah wajar sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang pada tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Adapun permasalahan yang sering timbul adalah tidak terkendalinya rencana yang diprogramkan oleh pihak sekolah dengan harapan untuk memenuhi keinginan secara maksimal yang seringkali kurang efektif karena tidak langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa di sekolah yang bersangkutan, hal ini bisa terjadi karena tidak adanya standarisasi yang diharuskan untuk dipenuhinya.¹⁰

Dengan keterbatasan sarana prasarana pendidikan dan pengajaran di sekolah sudah tentu mempengaruhi hasil pembelajaran siswa. Dengan kata lain proses pelaksanaan pendidikan di sekolah dan permasalahan pembelajaran bukan hanya dihadapi oleh guru yang bersangkutan, tetapi didukung pula oleh keberadaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi sarana dan prasarana sangat mendasar sekali dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, menciptakan iklim sosio emosional dan mengelola proses kelompok, sehingga keberhasilan guru dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan, indikatornya proses belajar mengajar berlangsung secara efektif. Sarana sering disebut juga sebagai

⁹ Margono, S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 22.

¹⁰ Azhari, Akyas, *Psikologi Umum dan Perkembangan* (Jakarta Selatan: Penerbit Teraju, 2004), 43.

administrasi materil, atau administrasi peralatan, adalah segenap proses penataan yang bersangkutan paut dengan pengadaan, pendayagunaan dan pengelolaan sarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Di dalam kegiatan pendidikan yang tergolong dalam fasilitas fisik atau fasilitas materiil antara lain: Perabotan ruang kelas, perabot kantor tata usaha, perabot dan peralatan laboratorium, perlengkapan perpustakaan, perlengkapan ruang praktek, dan sebagainya.¹¹

Sesuai dengan penelitian terdahulu yang di teliti oleh (Inda, 2017) yang hampir serupa dengan pembahasan yang akan di teliti. Yaitu pengaruh dana bos dan sarana prasarana sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas XI SMK Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2015/2016". Menggambarkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara dana BOS dan sarana prasarana sekolah secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa.

Sesuai dengan study pendahuluan di lapangan yang dilakukan di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung dengan mewawancarai semua kepala sekolah yaitu SMA Muhammadiyah 2 Majalaya ibu Cucu Siti Rodiah, S.Ag, SMA Muhammadiyah 3 Ciparay Hema Malini, SE, SMA Muhammadiyah 4 Margahayu bapak Daddy Ahmad Fauzani, S.Pd, SMA Muhammadiyah 5 Rancaekek ibu Yeni Andri An, S.Pd, M.Pd dan SMA Muhammadiyah 6 Kertasari bapak Made Gede Yuliasa W, SE untuk memperoleh gambaran awal dari penelitian yang akan diteliti, dari hasil wawancara menghasilkan gambaran bahwa Proses Pembelajaran di semua SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung masih belum sesuai dengan yang diharapkan atau belum sesuai dengan standar dalam proses pembelajaran, ini disebabkan kurangnya media untuk pembejaran masih belum terpenuhi dan dalam pemampaan fasilitas yang sudah ada masih belum terpenuhi, sehingga dalam proses pembelajarannya masih kurang, maka dari itu perlunya pemamfaatan Dana BOS dan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung.¹²

¹¹ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 2003), 83.

¹² Hasil Wawancara dengan Pihak sekolah (Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung) tanggal 18-19 Januari 2020) jam 10.00 - 14.00.

Setelah memahami penjelasan di atas, latar belakang masalah peneliti memilih judul ini yaitu sudah banyak sekolah yang menerima dana BOS namun untuk kemajuannya berbeda-beda apakah dana BOS menjadi salah satu penyebab kemajuan sekolah salah satunya yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jika memandang dari sisi pemanfaatan sarana prasarana pendidikan, beberapa kendala mengenai perencanaan sarana prasarana diantaranya adalah sulitnya menyesuaikan kebutuhan peserta didik jika harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, banyaknya kebutuhan sarana prasarana yang dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan harus disertai dengan perincian biaya yang membengkak. Selain itu juga pembiayaan menjadi faktor penghambat lainnya dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan dalam mutu sekolah terutama dalam peningkatan mutu pembelajaran. sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sarana prasarana pendidikan terhadap mutu pembelajaran di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar berakang peneliatian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembiayaan dana BOS di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana sarana prasarana pendidikan di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana mutu pembelajaran di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan dana BOS terhadap mutu pembelajaran di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung?
5. Bagaimana pengaruh sarana prasarana pendidikan terhadap mutu pembelajaran di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung?

6. Bagaimana pengaruh pembiayaan dana BOS dan sarana pendidikan secara bersamaan terhadap mutu pembelajaran di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memahami pengetahuan yang telah dipelajari oleh peneliti dengan melihat penerapannya dalam praktik sebenarnya. Sesuai dengan permasalahan diatas tujuan penelitian yang lebih spesifik adalah sebagai berikut:

Menganalisa pengaruh pembiayaan dana BOS dan sarana prasarana pendidikan terhadap mutu pembelajaran di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung.

1. Untuk menganalisa pembiayaan dana BOS di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung.
2. Untuk menganalisa sarana prasarana pendidikan di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung.
3. Untuk menganalisa mutu pembelajaran di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan dana BOS terhadap mutu pembelajaran di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui pengaruh sarana prasarana Pendidikan Terhadap Mutu pembelajaran di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung.
6. Menganalisa pengaruh pembiayaan dana BOS dan sarana prasarana pendidikan secara bersamaan terhadap mutu pembelajaran di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memperoleh data, menganalisis, mengetahui dan menarik kesimpulan tentang pengaruh pembiayaan dana BOS dan sarana prasaran pendidikan terhadap mutu pembelajaran di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritik

Hasil penelitian diharapkan menambah khazanah konsep dan teori pengaruh pembiayaan dana BOS dan sarana pendidikan terhadap mutu pembelajaran.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam mengembangkan teori dan penerapannya pada dunia praktik, khususnya pembiayaan dana BOS dan Sarana Pendidikan. Dan untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian akhir di Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya mengenai Pengaruh Pembiayaan dana BOS dan Sarana Pendidikan Terhadap Mutu Pembelajaran

c. Bagi Instansi/Lembaga

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tinjauan pengaruh pembiayaan dana BOS dan Sarana Pendidikan yang telah dijalankan sebagai masukan untuk meningkatkan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung yang ada menjadi lebih efektif dimasa yang akan datang.

E. Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

Pembahasan Batasan Masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik.

Batasan Masalah penelitian sangat penting dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan ataupun

kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek.

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu Mutu Pembelajaran di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung mengenai pembiayaan dana BOS dan Sarana Pendidikan. Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan diri dalam hal Pembiayaan dana BOS dan Sarana Pendidikan sebagai program dalam meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung.

F. Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis

1. Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pendidikan berkaitan dengan kebijakan sumber pendanaan pendidikan yang berasal dari pemerintah yaitu dengan menaikkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari total anggaran nasional, yang salah satunya dibuktikan dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah kepada seluruh sekolah/madrasah, Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Bantuan operasional sekolah adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Dijelaskan dalam PP Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.

Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Salah satu masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah- sekolah yang terdaftar.

BOS diberikan kepada sekolah tingkat dasar yaitu SD dan SMP guna mencapai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Meskipun program ini telah berjalan dan sukses namun masih banyak siswa lulusan SMP. yang putus sekolah dan tidak melanjutkan ke tingkat SMA. Untuk itu pemerintah telah mencanangkan dan melaksanakan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) sejak tahun 2013. Pendidikan Menengah Universal (PMU) bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah menyusun program Bantuan Operasional Sekolah yang disalurkan kepada seluruh SMA dan SMK baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia.

BOS SMA merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke Sekolah Menengah Atas dengan besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan dengan besarnya satuan dana bantuan. Tujuan dari BOS SMA adalah mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat.

Menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018, dana BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan dana BOS menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022. Tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan adalah dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat

dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Dana Bantuan Operasional Sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan meliputi: (1). Perencanaan dan penganggaran, (2). Pelaksanaan dan penatausahaan, (3). Pelaporan dan pertanggungjawaban. Dana BOS ditentukan oleh berbagai indikator yaitu: (1) Tujuan dana BOS, (2) Pengelolaan dana BOS menggunakan manajemen berbasis sekolah, (3) Penggunaan dana BOS, (4) Satuan biaya dan besaran dana BOS, (5) Penyaluran dana BOS, (6) Pertanggungjawaban keuangan dana BOS.

Pelaksanaan program BOS SMA harus mengikuti pedoman yang disusun oleh Pemerintah dalam Petunjuk Teknis BOS SMA dengan mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan prinsip Alokasi dana dari Program Bantuan Operasional Sekolah, Penyaluran dan Pengambilan Dana dari Program Bantuan Operasional Sekolah, Penggunaan dana dari Bantuan Operasional Sekolah. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi/pelaksanaan BOS ditinjau dari 3 prinsip Implementasi/pelaksanaan BOS, maka diperlukan suatu analisis. Analisis digunakan untuk menentukan tolak ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan dan penentuan suatu kebijakan. Analisis Implementasi/pelaksanaan Program Bantuan Operasional merupakan analisis untuk menentukan tolak ukur dan tingkat keberhasilan suatu program.

2. Sarana Prasarana Pendidikan

Di dalam pendidikan terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan, tidak dapat berdiri sendiri bertujuan agar komponen tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan mutu pembelajaran, salah satu komponen tersebut adalah sarana dan prasarana. Dalam pendidikan agar berjalan dengan baik perlu

¹³ Kemendikbud. Permendikbudrestek RI, *Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan*. No 2 Tahun 2022. Bab 1 pasal 1 ayat 4.

sarana dan prasarana yang memadai agar dalam proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan manajemen sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, pergerakan yang tepat, pengawasan dengan sungguh-sungguh.

Setiap mata pelajaran memiliki karakter yang berbeda dengan pelajaran lainnya. Dengan demikian, masing-masing mata pelajaran juga memerlukan sarana pembelajaran yang berbeda pula. Dalam menyelenggarakan pembelajaran guru pasti memerlukan sarana yang dapat mendukung kinerjanya sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan menarik. Dengan adanya dukungan sarana pembelajaran yang memadai, guru tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga dengan tulisan dan peragaan sesuai dengan sarana prasarana yang telah disiapkan oleh guru.

Dalam pelaksanaan kegiatan administrasi sarana dan prasarana pembelajaran di SMA meliputi perencanaan pengadaan barang, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan. Manajemen sarana prasarana yang lengkap dapat menciptakan kelancaran dalam belajar mengajar, karena tersedianya fasilitas pembelajaran yang memadai, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai diharapkan pembelajaran akan menjadi efektif dan efisien.

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Satuan Pendidikan.¹⁴ Menurut keputusan menteri P dan K No 079/ 1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 (tiga) kelompok besar yaitu: 1) Bangunan dan perabot sekolah. 2). Alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga dan laboratorium. 3). Media pendidikan yang dapat di kelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil.¹⁵

¹⁴ Peraturan Pemerintah, *Tentang Standar Nasional Pendidikan* (Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 25), 15.

¹⁵ Keputusan Menteri P dan K, *Sarana Pendidikan* (Nomor 079 Tahun 1975).

Sarana prasarana pendidikan mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, BAB VII standar sarana dan prasarana, pasal 42 meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.¹⁶ Dan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah/madrasah pendidikan umum kelengkapan prasarana dan sarana Sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki saranaprasarana meliputi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga. Dan ketentuan mengenai ruang-ruang tersebut beserta sarana yang ada di setiap ruang diatur dalam standar tiap ruang sebagai berikut.¹⁷

Sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu berdasarkan habis tidaknya, berdasarkan bergerak tidaknya, dan berdasarkan hubungan dengan proses pembelajaran. Apabila dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Apabila dilihat dari bergerak atau tidaknya pada saat pembelajaran juga ada dua macam, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Sementara jika dilihat dari hubungan sarana tersebut terhadap proses pembelajaran, ada tiga macam, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Prasarana pendidikan disekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu langsung dan tidak langsung. Sarana pendidikan yang ditinjau dari habis tidaknya dipakai antara lain Sarana pendidikan yang habis dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat.

¹⁶ Peraturan Pemerintah, *Tentang Standar Nasional Pendidikan* (Nomor 19 Tahun 2005, BAB VII, pasal 42).

¹⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, *Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD, SMP, SMA* (Nomor 24 Tahun 2007).

Sebagai contoh kapur, spidol yang biasanya digunakan oleh guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Selain itu ada sarana yang pendidikan yang berbagai bentuk, misalnya kayu dibentuk menjadi meja, kursi, rak buku yang digunakan dalam proses belajar di sekolah. Sarana pendidikan tahan lama Sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama atau digunakan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Misalnya meja, kusi, papan tulis, beberapa peralatan olahraga, semua barang-barang itu digunakan dalam waktu yang relatif lama. Sarana pendidikan yang dtinjau dari bergerak tidaknya

1. Sarana pendidikan yang bergerak Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainanya. Meja, kusi sekolah, rak nuku dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan kita dalam proses belajar di sekolah.
2. Sarana pendidikan yang tidak bergerak Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang ridak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya saja pipa air yang ada di sekolah tersebut relatif tidak mudah untuk dipindahklan ke tempat- tempat tertentu. Sarana pendidikan ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, antara lain :

1. Alat pelajaran Alat pelajaran adalah alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya saja buku, alat tulis, alat praktik pelajaran,.
2. Alat peraga Alat peraga adalah alat bantu pendidikan yang dapat berupa perbuatan- perbuatan atau benda-benda yang dapat melengkapi, memperjelas pembelajaran sehingga siswa akan lebih mudah dalam menerima pembelajaran.
3. Media pengajaran Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang berfungsi sebagai perantara dalam proses belajar mengajar sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan dari pendidikan. Media pembelajaran yang digunakan ada tiga jenis yaitu media pembelajaran visual, audio, dan audiovisual. Prasarana pendidikan dibagi menjadi 2 macam, yaitu

1. Prasarana pendidikan langsung Prasarana pendidikan langsung adalah prasarana yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajara. Misalnya ruang kelas, ruang laboraorium, ruang komputer.
2. Prasaran pendidikan tidak langsung Prasarana pendidikan tidak langsung adalah prasarana pendidikan yang tidak langsung digunakan dalam proses

pembelajaran, tetapi prasarana pendidikan tidak langsung ini menunjang proses pembelajaran, misalnya kantin, kantor tata usaha di sekolah, jalan menuju ke sekolah, UKS, tempat parkir.

3. Mutu Pembelajaran

Sungguh masih perlu kita renungkan sekolah merupakan satu pilar utama dari gerakan mencerdaskan bangsa menanamkan nilai-nilai didalamnya. Mengalihkan kebudayaan pastilah menjadi isi kegiatannya. Semua operasional sekolah perlu pencerahan pemikiran dan pengetahuan. Sekolah bukan dalam situasi yang statis, perubahan mengalir sebagai kepastian yang sukar diprediksi. Kepala sekolah, guru, orang tua, dan semua masyarakat komponen boleh jadi tidak menginginkan sekolah gagal menjalankan fungsinya. Anak-anak tak bermutu keluar dari dalam sekolah. Jika itu terjadi, putuslah harapan orang tua beserta anaknya.¹⁸

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan mengamatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.¹⁹ pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar sampai tingkat atas serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Sejak awal tahun 1970-an, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan terus-menerus sejalan dengan program pembangunan dibidang pendidikan yang mulai dilaksanakan secara terprogram sejak 40 tahun yang lalu. Sejak saat itu pemerintah mulai merintis program perluasan kesempatan belajar bagi semua warga negara, pada semua jenis dan jenjang pendidikan, khususnya kesempatan memperoleh pendidikan dasar. Disamping untuk perluasan kesempatan

¹⁸ Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan* (Jakarta: PT Grasindo, 2016), 122.

¹⁹ Depdiknas, Undang-undang RI, *tentang sistem pendidikan nasional* (No.20 tahun 2003).

belajar, pembangunan diarahkan juga pada peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan mutu pembelajaran yang berkualitas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya memuat tentang standar proses. Dalam Bab I Ketentuan Umum SNP, yang dimaksud dengan standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Bab IV Pasal 19 Ayat 1 SNP lebih jelas menerangkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemampuan sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.²⁰

Mutu pembelajaran Sesuai dengan standar proses pendidikan dasar dan menengah selanjutnya disebut standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan.²¹ Mutu pembelajaran mengacu pada Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yaitu standar proses yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.²²

Uraian di atas menunjukkan bahwa mutu pembelajaran dianggap bermutu bila berhasil mengubah sikap, perilaku dan keterampilan peserta didik dikaitkan dengan tujuan pendidikannya. Mutu pendidikan sebagai sistem selanjutnya

²⁰ Peraturan Pemerintah, *Tentang Standar Nasional Pendidikan* (Nomor 19 Tahun 2005).

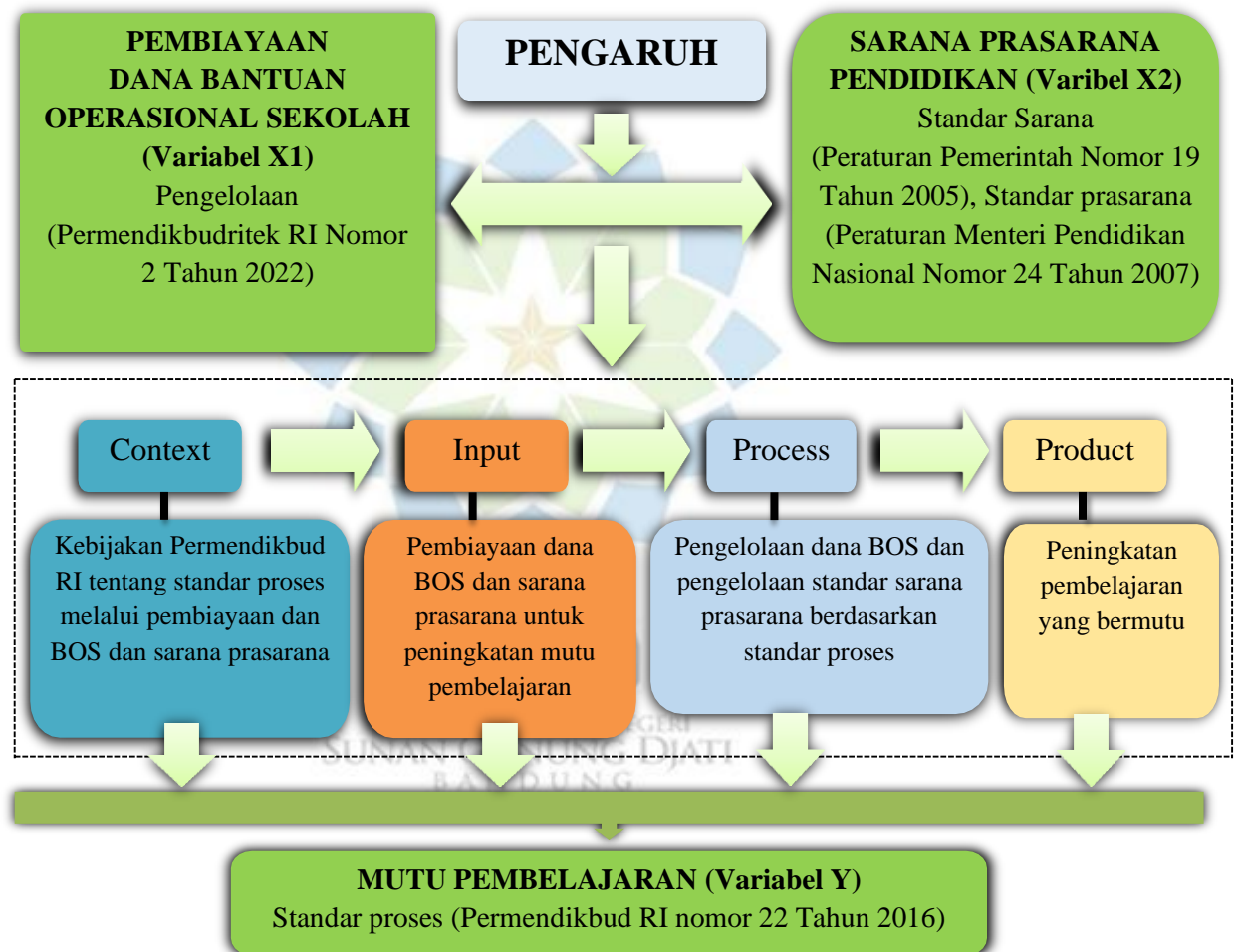
²¹ Kemendikbud. *Permendikbud, Tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah*, nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1.

²² Kemendikbud. *Permendikbud, Tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah*, nomor 22 tahun 2016 Pasal 1 ayat 2.

bergantung pada mutu komponen yang membentuk sistem, serta proses pembelajaran yang berlangsung hingga membuahkan hasil.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat menggambarkan model penelitian seperti gambar di berikut ini:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan deskripsi teoritis dan kerangka berfikir diatas, dapat ditarik hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian yang telah dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

1. Ada pengaruh pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah terhadap mutu pembelajaran SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung secara sendiri-sendiri (parsial).

2. Ada pengaruh sarana prasarana pendidikan terhadap mutu pembelajaran SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung secara sendiri-sendiri (parsial).
3. Ada pengaruh pembiayaan dana Bantuan Operasional Sekolah dan sarana prasarana pendidikan terhadap mutu pembelajaran SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Bandung secara bersamaan (simultan).

G. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan referensi bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang telah dipilih.

1. Fathullah (2018) yang berjudul Efektivitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan pada MIN Lumpatan Kabupaten Musi Banyuasin. *Studi Manajemen Pendidikan*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018. hlm. 181-206. Persamaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana BOS dan dalam meningkatkan proses pembelajaran dan Perbedaan penelitian adalah dari teknis analisis, variable penelitian dan tempat penelitian, untuk Teknik yang digunakan dengan teknik analisis data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi, dan untuk variable penelitian hanya membahas dua variabel.
2. M. Ridwan Tikollah (2022) yang berjudul Analisis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler terhadap hasil belajar siswa jenjang SMP di Kabupaten Maros, Volume 5 Nomor 1 Bulan Januari 2022 Hal. 53-59. p-ISSN: 2614-2139; e-IS SN: 2614-1973. Persamaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penggunaan dana BOS dan untuk mengetahui pengaruh penggunaan dana BOS Reguler difokuskan untuk belanja mutu pembelajaran dan dari teknis analisis. dan Perbedaan penelitian adalah dari tempat penelitian dan penelitian ini merupakan penelitian

asosiatif-kausal yang menjelaskan penggunaan dana BOS Reguler untuk Belanja Mutu Pembelajaran dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa jenjang SMP.

3. Hamirul (2019) yang berjudul Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam memperbaiki proses pembelajaran, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2019. P-ISSN 2548-7094; E-ISSN 2614-8021. Persamaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan dana BOS. dan Perbedan penelitian adalah Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tempat penelitian, dan hanya berfokus memperbaiki proses pembelajaran dan hanya membahas dua variabel.
4. Inda Fresti Puspitasari (2017). yang berjudul Pengaruh Dana Bos dan sarana prasarana sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas Xi SMK Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Vol. 1. hal 1-15. Persamaan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk menguji pengaruh dana BOS sarana prasarana sekolah terhadap hasil belajar siswa dan perbedan penelitian adalah dari tempat penelitian dan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif
5. Nurul Fatona (2021) yang berjudul Analisis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Terhadap Hasil Belajar Siswa Jenjang SMP di Kabupaten Maros, Vol. 15; No. 02; 2021; 474-483. ISSN: 1907-932X. Persamaan dari penelitian ini adalah dari teknis analisis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manfaat dana BOS terhadap mutu proses pembelajaran, dan Perbedan penelitian adalah dari tempat penelitian dan hanya membahas dua variabel.
6. Rika Megasari (2014) yang berjudul Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di smpn 5 bukittinggi Volume 2 Nomor 1, Juni 2014, 636 - 831. Persamaan dari penelitian ini adalah penelitian ini berfokus terhadap pengelolaan sarana prasarana dalam proses belajar mengajar dan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, dan Perbedan penelitian adalah dari variabel Penelitian, teknis analisis dan tempat penelitian.

7. Rosnitini (2021) yang berjudul Manajemen sarana prasarana dalam meningkatkan mutu pembelajaran di smp al hidayah medan tembung Vol 1 No. 2 April-Juni 2021 ISSN : 2775-2380. Persamaan dari penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui mutu pembelajaran dan perbedaan penelitian adalah memfokuskan penelitiannya terhadap manajemen sarana prasarana dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.
8. Sylvia Dyah Kusuma Wardani (2021) yang berjudul Pengelolaan sarana dan prasarana dalam menunjang mutu pembelajaran peserta didik di masa pandemi covid-19 Volume 09 Nomor 3 Tahun 2021,516-531. Persamaan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan sarana prasarana dalam menunjang mutu pembelajaran dan perbedaan penelitian adalah untuk menganalisis pengelolaan sarana prasarana dalam menunjang mutu pembelajaran peserta didik di masa pandemi Covid-19 dan Penelitian ini menggunakan menggunakan metode studi literatur.
9. Yunus Kenoret Benu (2019) yang berjudul Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan di Yayasan Pendidikan Gloria Flobamora, Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019. e-ISSN: 2549-9114 dan p-ISSN: 2549-9203. Persamaan dari penelitian ini adalah dari pemanfaatan sarana prasarana dan perbedaan penelitian adalah dari perencanaan sarana prasarana, penggunaan sarana prasarana, pengendalian sarana prasarana, evaluasi sarana prasarana, Apa faktor penghambat dan pendukung sarana prasarana dan solusi mengatasi hambatan optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.